

ANALISIS BELANJA LANGSUNG DAERAH TERHADAP KEMISKINAN DI ACEH

M Satrio Budiharjo ¹⁾, Ferayanti²⁾ Muhammad Ilhamsyah Siregar³⁾

¹⁾Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

email: satriobudiharjo1993@gmail.com

²⁾Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

email: ferayanti@unsyiah.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of direct spending on poverty in Aceh Province, the method used in analyzing is Pool Least Square (PLS) analysis using annual data from 2013-2017 23 Cities / Districts in Aceh. The results showed that the direct expenditure variable negatively affected poverty in Aceh Province. Based on the coefficient value shown $-5.24E-09$ if poverty falls by 1 percent, direct expenditure will increase by Rp. 5,240,000,000.

Keywords: Direct shopping, Poverty, Pool Least Square (PLS)

Abstrak

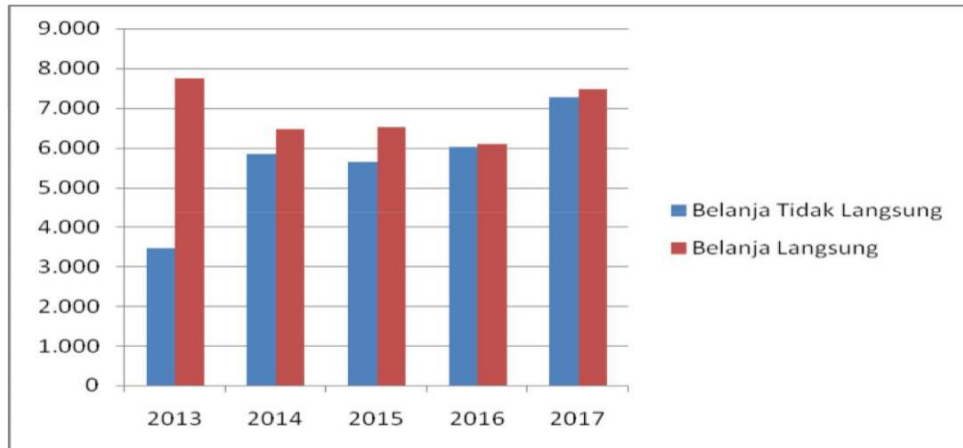
Pengkajian ini ditujukan untuk menganalisa pengaruh belanja langsung terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, metode yang didukung dalam menganalisis adalah analisis *Pool Least Square* (PLS) menggunakan data tahunan dari 2013-2017 23 Kabupaten/ Kota di Aceh. Hasil kajian ini merujuk pada variabel belanja langsung berimbas negatif atas kesengsaraan atau kesulitan di Provinsi Aceh. Berdasarkan nilai koefisien menunjukkan $-5.24E-09$ apabila kemiskinan turun sebesar 1 persen maka belanja langsung akan meningkat sebesar Rp. 5.240.000.000.

Kata kunci : Belanja langsung, Kemiskinan, Pool Least Square (PLS)

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah seringkali diartikan terlalu sempit padahal dalam suatu objek pengelolaan keuangan daerah perlu dicermati dalam dua sisi, yaitu berdasarkan sisi penerimaan daerah bahwa mobilisasi sumber keuangan melalui pajak daerah dan retribusi daerah serta optimalisasi pinjaman daerah yang merupakan Laba BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dari sisi pengeluaran daerah harus dapat didefinisikan sebagai proses penganggaran. Keuangan daerah memberikan sebuah gambaran dan analisa terhadap informasi dalam pembuatan suatu kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilihat dari kemampuan dan kemandirian suatu daerah (Halim, 2004).

Belanja akan dibagi hasilnya, memberi bantuan dana serta pengeluaran yang tidak diharapkan, dan belanja langsung juga menggambarkan pengeluaran yang direalisasikan secara langsung serta melakukan atau melaksanakan kegiatan dan program yang menyangkut pengeluaran modal atau belanja modal.

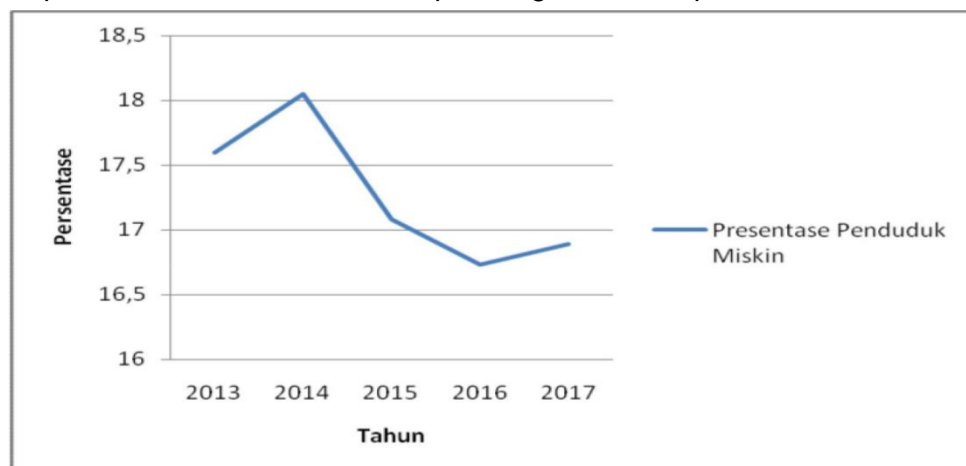


Sumber : BPS Aceh, 2017

Grafik 1.1
Realisasi Anggaran belanja langsung dan tidak langsung tahun 2013-2017
Provinsi Aceh (Dalam Miliar Rupiah)

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat dilihat belanja tidak langsung mengalami kenaikan setiap tahunnya berbeda dengan belanja langsung yang relatif berfluktuasi. Hal ini patut disayangkan karena seharusnya belanja pemerintah lebih dititikberatkan pada belanja modal yang bersifat investasi. Penurunan persentase belanja barang dan jasa setiap tahunnya patut diapresiasi penggunaan belanja langsung lebih dititik beratkan pada belanja modal yang berorientasi terhadap investasi.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dicanangkan baik itu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat nampaknya belum berdampak secara signifikan terhadap kemiskinan yang ada di Aceh dari data jumlah penduduk miskin yang ada di Aceh yang kami himpun dari BPS Provinsi Aceh menunjukkan jumlah kemiskinan di Aceh sangat tinggi dengan rata-rata jumlah penduduk miskin sebanyak 939.000 jiwa dan rata-rata presentase tingkat kemiskinan 21,17 persen untuk melihat jumlah dan presentase penduduk miskin yang ada di provinsi aceh tahun 2005 sampai dengan 2017 dapat dilihat di Grafik 1.2



Sumber : BPS Aceh, 2017

Grafik 1.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh 2013-2017

Berdasarkan Grafik 1.2. Pada tahun 2014 kemiskinan Aceh meningkat menjadi 18,05 persen dan mengalami penurunan di tahun berikutnya pada tahun 2015 menjadi 17,08 persen. Penurunan tersebut dipicu oleh membaiknya sektor rill yang mencakup sektor konstruksi dan jasa pendidikan. Berdasarkan masalah dari pembahasan yang telah

dijelaskan di atas, oleh karena itu pengkajian ini dikerucutkan guna melihat pengaruh anggaran belanja langsung daerah dengan angka kemiskinan di Aceh.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi Fiskal

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

1. Belanja Langsung

Menurut peraturan permendagri Nomor 13 di tahun 2006 belanja daerah yaitu belanja yang sangat terkait dengan program atau pelaksanaan dan penjabaran melalui kebijakan SKPD dengan tujuan bentuk upaya yang berisi satu atau dua kegiatan bahkan lebih dengan menggunakan sumber sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang terukur sesuai dengan tujuan atau misi dari SKPD. Sebagai masukan input atau pengeluaran output dalam bentuk jasa atau barang, Target atau sasaran ialah hasil yang sangat diharapkan suatu program pengeluaran dari sebuah kegiatan.

2. Belanja Tidak langsung

Menurut permendagri No 13 Tahun 2006 belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Hasil penelitian Iskana (2009) tentang Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berpengaruh terhadap belanja langsung daerah terhadap kemiskinan di Aceh. Pengujian ini terbatas kajian pada belanja langsung daerah di Aceh. Untuk data tahun 2013-2017. Data itu disajikan dalam bentuk data sekunder yaitu meliputi data kuantitatif yang dilengkapi dengan data keuangan APBD Aceh

Jika memiliki T periode perkembangan ekonomi ekonomi jangka panjang ($t=1,2,\dots,T$) dan N Jumlah perseorangan ($l=1,2,\dots,N$) dari statistik tersebut kita dapat memiliki total dengan jumlah sebanyak NT. Kalau penjumlahan satuan waktu bersamaan dengan individu lainnya maka informasi atau data yang dimaksud adalah data panel tetap. Dan seandainya penjumlahan unit waktu sangat berbeda setiap individunya maka hasil tersebut bisa disebut panel yang tidak teratur. (Gujarati, 2010:31). Penghasilan yang didapat dengan melakukan dengan data panel ialah sebagai berikut :

1. Data panel juga menggunakan atau menggabungkan dari time series data atau cross section yang bisa memberikan data yang lebih akurat/baik.
2. Memasukkan data cross section dan time series yang bisa mengurangi masalah yang akan timbul jika ada pengurangan variabel (OV)

Metode regresi linier digunakan dengan menggunakan data time series dan cross section, maka metode atau model tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

Dimana :

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N x T = banyaknya data panel

Regresi data panel dapat dimodelkan sebagai berikut:

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta_1 (BLit) + e_{i,t}, \dots \dots \dots (3.2)$$

Dimana :

$Y_{i,t}$ = Kemiskinan

- α = Konstanta
- β_1 = Koefisien Regresi
- $BL_{i,t}$ = Belanja Langsung Kabupaten i pada tahun-t
- e_i = *Error Term*

Demi mengetahui model menggunakan data panel, ada beberapa strategi, yaitu:

1. *Common Effect Model*,

Metode ini bisa dilihat bahwa pendekatan data panel yang sangat sederhana, Metode ini juga tidak melihat hanya individu maupun waktu sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku antar individu tersebut sama sama dalam jangka waktu tertentu, Metode ini hanya dapat dikombinasikan dengan data time series dan cross section dalam bentuk pool, untuk mengetahui pendekatan kuadrat yang rendah. (*pooled least square*).

2. *Fixed Effect Model*

Dapat diasumsi bahwa mempunyai pengaruh yang sangat berbeda antar individu. Dan perbedaan ini dapat dilihat melalui perbedaan perbedaan disetiap intersepsnya.

3. *Random Effect Model*

Dapat diasumsikan dari pengaruh tiap tiap personal yang dipakai untuk melihat salah satu dari komponen yang error dan mempunyai sifat acak atau tidak teratur dan tidak bergabung dengan variabel yang sempurna, Model ini juga sering diperjelas dengan sebutan error component.

Definisi Opersional Variabel

1. Kemiskinan merupakan jumlah penduduk miskin menurut kriteria BPS 23 Kota / Kabupaten di Provinsi Aceh dari tahun 2013-2017 yang dihitung dalam satuan jiwa.
2. Belanja langsung merupakan total keseluruhan belanja publik diantaranya belanja infrastruktur, belanja pendidikan dan belanja kesehatan dari 23 Kota / Kabupaten di Provinsi Aceh dari tahun 2013-2017 yang dihitung dalam satuan rupiah.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Hipotesis pada Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat

Metode ini dibuat melalui pengkajian analisa data yang empiric dan diperoleh oleh instansi yang melekat dari sumber sumber yang sangat jelas. Analisa ini juga dilakukan guna mengetahui pengaruh dari variable bebas atas variable yang terikat, yakni apakah belanja langsung berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Maka dari itu kalau ingin melihat akibat dari variable bebas ada didasari dari dua nilai yaitu seperti probabilitas P-Value yang didukung dengan tujuan untuk mengetahui positif atau signifikan nilai koefisien dari hubungan arah.

Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, jika probabilitas < 0,05, maka tolak H_0 dan menerima H_1 . Karena pada uji sebelumnya sudah dipastikan memakai *Fixed Effect Model* maka Uji Langrange Multiplier sudah tidak perlu dilakukan.

Tabel 4.3
Hasil Pengujian *Pool Least Square*

Dependent Variable: POV
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/04/19 Time: 01:52
 Sample: 2013 2017
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Belanja Langsung	-5.24E-09	1.80E-09	-2.912774	0.0045

C	37782.01	729.6626	51.78011	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.997562	Mean dependent var	35694.77	
Adjusted R-squared	0.996946	S.D. dependent var	26689.71	
S.E. of regression	1475.024	Akaike info criterion	17.61405	
Sum squared resid	1.98E+08	Schwarz criterion	18.18691	
Log likelihood	-988.8081	Hannan-Quinn criter.	17.84657	
F-statistic	1618.850	Durbin-Watson stat	1.569080	
Prob(F-statistic)	0.000000			

1. Koefisien Determinan R²

Koefisien determinan dilakukan untuk menghitung berapa jauh keefektifan model dalam menegaskan variabel dependen. Nilai koefisien yaitu antara nol hingga dengan satu dan dijelaskan dengan nilai *adjusted* R². Menurut perolehan estimasi mempunyai koefisien determinan R² sebesar 0,997562 atau 99 persen.

Perhitungan ini mempunyai arti maka variabel Kemiskinan didominasi oleh variabel belanja langsung adalah sebesar 99 persen. Sedangkan sisa belanja langsung sebesar 1 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini, seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran.

2. Pengujian Terhadap Variabel Belanja Langsung

Belanja Langsung sebagai merupakan yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai berbagai program Satuan Kerja Perangkat Daerah demi mencapai suatu tujuan dari pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat baik berupa barang maupun jasa. Semakin tinggi belanja langsung suatu daerah maka akan menimbulkan *multiplier Effect* terhadap perekonomian sehingga perekonomian tumbuh, namun setiap program yang ditetapkan oleh pemerintah harus tepat sasaran baik itu menyangkut pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan serta peningkatan fasilitas pendidikan, dengan memperhatikan aspek tersebut maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Tingkat probabiliti dengan nilai perhitungan dari Variabel belanja daerah terhadap kemiskinan adalah 0,0045. Perkara ini bermaksud bahwa belanja langsung berpengaruh terhadap kemiskinan karena nilai probabilitinya sebesar 0,0045, angka tersebut lebih sedikit dari angka critical value sebanyak 0,05 maka dapat diartikan signifikan secara statistik dan nilai koefisien menunjukkan tanda negatif yaitu -5.24E-09 yang artinya apabila kemiskinan turun sebesar 1 persen maka anggaran belanja langsung akan naik sebesar Rp. 5.240.000.000.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Ishak, 2017) bahwa belanja langsung merupakan belanja yang dikeluarkan untuk membiayai program-program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat yang mana program tersebut untuk membiayai investasi publik diantaranya pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan dimana belanja pada bidang-bidang produktif akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan penelitian ini adalah belanja langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan pada 23 Kota / Kabupaten di Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pemerintah meningkatkan pengeluaran atas belanja langsung maka akan mengakibatkan kemiskinan menurun.

SARAN

Dari kesimpulan diatas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah dapat menetapkan alokasi belanja langsung yang jumlahnya lebih besar daripada anggaran belanja tidak langsung di Aceh dengan tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan yang lebih besar
2. Peneliti selanjutnya dapat memperkaya jumlah observasi penelitian dengan menambah jumlah variabel penelitian yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2017). *Produk Domestik Regional Bruto (Gross Regional Domestic product)*. BPSKabupaten Nagan Raya.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2017). *Provinis Aceh Dalam Angka*. BPS. Banda Aceh
- Gujarati, Domodar N. (2010) Dasar-dasar Ekonometrika, Salemba Empat, Jakarta
- Ishak, J. F. (2017). Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Kemiskinan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 17(1), 55-59.
- Iskana, Ida. 2009. Pengaruh belanja dan Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran, Malang, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.